



Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan di UPTD Kecamatan Tomia

Diterima :

4 Februari 2025

Publikasi :

31 Maret 2025

Edisi Jurnal :

Volume 2, Nomor 1
Maret 2025

Bulan/Tahun Edisi :

Maret – Agustus 2025

Kata kunci : *Evaluasi, Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, UPTD Kesehatan*

Lenbaga Pengelola Jurnal & Penerbit :

Pengelola dan Penerbit Cetak oleh *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP)*.

Penerbit Online (OJS3) Lembaga Riset Dan Inovasi (LeRIN) – Universitas Dayanu Ikhsanuddin.

Alamat :

Jalan Dayanu Ikhsanuddin
No. 124, Kode Pos 93721
Baubau, Sulawesi Tenggara,
Indonesia.

Email:

jurnalbarataind@gmail.com |

¹Dirman, ²Rahmawati, ³La Didi

^{1,2,3}Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Program Studi Administrasi Negara

¹dirmantomia63@gmail.com

¹*corresponding author*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja dalam Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal Di Bidang Kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi Tahun 2020. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian digunakan untuk penelitian pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawan eksperimen) di mana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan tri-anggurasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) Evaluasi Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal di UPT Puskesmas Tomia telah dilaksanakan sesuai standar yang ditentukan dapat dilihat dari hasil capaian pelayanan yang makin tahun makin meningkat dan sebagian besar memenuhi angka yang telah ditetapkan, hasil tersebut dapat dilihat dari tabel Laporan Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan UPTD Puskesmas Tomia Tahun 2020. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Puskesmas Kecamatan Tomia terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan yaitu a) Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dilakukan penambahan karna terjadi kekosongan di antaranya Rekam Medik, Kesehatan Keliling, Supir Ambulans Bidan dan Perawat yang berstatus PNS yang masih kurang dan Beberapa bidang lain. b) Sarana Prasarana UPTD Puskesmas Tomia masih kurangnya fasilitas kesehatan seperti laboratorium, obat-obatan dan beberapa bangunan kesehatan yang sudah tidak layak pakai.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi publik, termasuk dalam sektor kesehatan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih sering mengeluhkan buruknya layanan yang mereka terima. Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat melalui fasilitas layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, seperti Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 951/Menkes/SK/VI/2000 yang menegaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat. Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan derajat kesehatan yang optimal dan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan, mengatur, serta mengawasi layanan kesehatan secara merata dan terjangkau. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan nasional adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas memiliki tugas memberikan

pelayanan kesehatan dasar yang bersifat promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif (pemulihan).

Layanan ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, usia, atau status sosial. Namun, dalam praktiknya, tidak semua Puskesmas mampu memberikan pelayanan yang optimal. Masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan tenaga medis, kurangnya fasilitas dan sarana kesehatan, serta rendahnya profesionalisme dalam pelayanan. Mutu pelayanan kesehatan dapat dievaluasi menggunakan model yang dikembangkan oleh Donabedian (1980), yang mencakup tiga aspek utama: (1) Struktur, yaitu sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, serta sistem organisasi dan manajemen; (2) Proses, yaitu interaksi antara tenaga medis dan pasien dalam memberikan layanan kesehatan sesuai standar profesi; serta (3) *Outcome*, yaitu hasil akhir dari pelayanan kesehatan yang mencerminkan tingkat kepuasan pasien dan perubahan derajat kesehatan masyarakat. Jika ketiga aspek ini tidak terpenuhi dengan baik, maka kualitas layanan kesehatan akan rendah dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan pemerintah. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap standar pelayanan minimal menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam sektor kesehatan. Menurut Subarsono (2008), evaluasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui efektivitas suatu kebijakan,

mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan program, memenuhi tuntutan akuntabilitas publik, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Evaluasi pelayanan kesehatan juga harus mencakup lima indikator utama, yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan layanan. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di UPTD Puskesmas Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelayanan kesehatan. Keluhan masyarakat terkait rendahnya kualitas layanan kesehatan masih sering terjadi, mulai dari ketidakhadiran pegawai, keterlambatan dalam memberikan layanan, hingga kurangnya komunikasi yang baik antara tenaga medis dan pasien. Selain itu, rendahnya disiplin pegawai yang sering meninggalkan tempat kerja sebelum jam istirahat menyebabkan terganggunya penyelesaian tugas dan pelayanan terhadap masyarakat. Berangkat dari permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan kesehatan serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem pelayanan kesehatan di masa mendatang. Penelitian ini mengadopsi beberapa teori yang relevan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan di bidang kesehatan. Mengacu pada teori kebijakan Subarsono (2008), evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas

suatu kebijakan setelah berjalan dalam kurun waktu tertentu agar *outcome* dan dampaknya dapat terlihat. Evaluasi, sebagaimana dijelaskan oleh Alkin (2004) dalam Widoyoko (2013), merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi guna membantu pengambilan keputusan. Dalam konteks kesehatan, evaluasi menjadi bagian dari sistem manajemen yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring, dengan tujuan mengukur efektivitas program dalam mencapai targetnya (Stufflebeam dalam Lababa, 2008). Lebih lanjut, standar pelayanan minimal (SPM) dalam bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Permenkes No. 43 Tahun 2016 menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memenuhi standar pelayanan yang optimal untuk masyarakat. Levey & Loomba (1973) menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan merujuk pada klasifikasi pelayanan Hardiyansyah (2011), penelitian ini menelaah implementasi standar pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk evaluasi terhadap indikator standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 2 Tahun 2018 dan UU No. 25 Tahun 2009.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi

standar pelayanan minimal di bidang kesehatan. Menurut Sugiyono (2010) dalam Pasolong (2012:161), penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yakni dengan menggabungkan observasi, wawancara, dan dokumentasi agar memperoleh data yang valid dan komprehensif.

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup observasi untuk mengamati langsung pelaksanaan standar pelayanan minimal di UPTD Puskesmas Kecamatan Tomia, wawancara dengan informan kunci seperti kepala puskesmas, tenaga kesehatan, dan staf administrasi guna menggali informasi terkait evaluasi kebijakan, serta dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dari laporan tahunan dan regulasi yang relevan. Data yang diperoleh dari ketiga instrumen ini kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan memilah dan merangkum informasi yang relevan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar lebih fokus pada tujuan penelitian. Setelah itu, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan secara sistematis implementasi standar pelayanan minimal di puskesmas. Penyajian data juga didukung dengan tabel atau skema untuk memperjelas temuan penelitian. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan dengan

menganalisis pola dan hubungan dalam data guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas kebijakan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi standar pelayanan minimal di bidang kesehatan, sehingga dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemangku kebijakan untuk perbaikan ke depan.

PEMBAHASAN

Pengorganisasian

Agar rencana kegiatan di Puskesmas dapat terlaksana dengan baik, diperlukan pengorganisasian yang efektif. Pengorganisasian ini mencakup dua aspek utama. Pertama, penentuan penanggung jawab dan pelaksana untuk setiap kegiatan serta setiap satuan wilayah kerja. Dalam hal ini, seluruh program kerja dan wilayah kerja dibagi secara merata kepada seluruh petugas puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing. Penentuan tanggung jawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim di awal tahun kegiatan. Kedua, pengorganisasian juga mencakup penggalangan kerja sama tim secara lintas sektoral untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan tugas. Kepala Puskesmas Tomia menekankan bahwa pembagian tugas yang jelas sangat penting agar program kerja dapat berjalan dengan baik. Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris Puskesmas UPTD Kecamatan Tomia, yang menekankan

bahwa tugas-tugas diberikan sesuai bidang dan kemampuan masing-masing petugas untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan. Seorang perawat di Puskesmas Tomia juga mengungkapkan bahwa pembagian kerja telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan program dan pelayanan kesehatan. Selain itu, staf puskesmas menambahkan bahwa administrasi dilakukan secara sistematis berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan di UPTD Puskesmas Tomia menjalankan tugasnya sesuai dengan pembagian kerja yang telah ditetapkan, sehingga standar pelayanan dapat diterapkan dengan baik.

Kegiatan

Manajemen merupakan ilmu terapan yang disesuaikan dengan fungsi organisasi, bentuk kerja sama manusia dalam organisasi, serta ruang lingkup masalah yang dihadapi. Dalam bidang kesehatan, manajemen diterapkan untuk mengatur perilaku staf dalam institusi pelayanan kesehatan guna memastikan pelayanan yang efektif, efisien, dan produktif dalam menangani gangguan kesehatan individu maupun masyarakat (Muninjaya, 2011). Dalam konteks puskesmas, manajemen melibatkan tiga komponen utama, yaitu perencanaan (P1), penggerakan pelaksanaan (P2), serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian (P3). Perencanaan (P1) merupakan tahap awal dalam manajemen puskesmas yang

bertujuan menyusun rencana tahunan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di wilayah kerja. Rencana ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu rencana tahunan upaya kesehatan wajib dan rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib mencakup berbagai program dasar seperti promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit. Untuk memastikan keberhasilan perencanaan, puskesmas harus melalui beberapa langkah strategis, yakni menyusun usulan kegiatan, mengajukan usulan kegiatan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota, serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Langkah pertama dalam perencanaan adalah menyusun usulan kegiatan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah yang berlaku. Usulan ini dirancang dalam bentuk matriks (*Gantt Chart*) yang mencakup rincian kegiatan, tujuan, sasaran, volume, waktu pelaksanaan, lokasi, serta estimasi biaya. Rencana ini kemudian diajukan dalam pertemuan perencanaan tahunan puskesmas yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BPP dan camat, guna memastikan keselarasan dengan siklus perencanaan di tingkat kabupaten/kota. Setelah itu, puskesmas mengajukan usulan kegiatan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan persetujuan anggaran. Dalam tahap ini, puskesmas juga harus melampirkan kebutuhan rutin, sarana dan prasarana, serta operasional yang diperlukan. Langkah terakhir adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui dalam bentuk Rencana Kerja Kegiatan (*Plan of Action*), yang disusun secara sistematis dengan pemetaan

wilayah guna memastikan efektivitas implementasi program kesehatan di puskesmas.

Perencanaan upaya kesehatan pengembangan.

Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas atau dikembangkan secara inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah pertama dalam perencanaan upaya ini adalah mengidentifikasi masalah kesehatan yang dapat ditangani, baik melalui survei langsung maupun kesepakatan kelompok. Selanjutnya, puskesmas menyusun usulan kegiatan yang mencakup rincian program, sasaran, waktu, lokasi, serta perkiraan biaya, yang kemudian diajukan dalam bentuk matriks (*Gantt Chart*). Setelah itu, usulan kegiatan diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pihak terkait untuk mendapatkan pembiayaan. Langkah terakhir adalah menyusun rencana pelaksanaan yang telah disetujui, yang dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan wajib agar program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penggerakan dan Pelaksanaan Puskesmas (P2)

Tujuan Penggerakan dan Pelaksanaan (P2) di Puskesmas adalah meningkatkan fungsi puskesmas dengan memperkuat kerja tim serta koordinasi lintas program dan sektor. Langkah-

langkahnya meliputi pengorganisasian, penyelenggaraan, dan pemantauan. Pengorganisasian mencakup penentuan penanggung jawab serta pembagian tugas yang merata kepada seluruh tenaga puskesmas. Selanjutnya, penyelenggaraan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, termasuk pengaturan jadwal dan pelaksanaan kegiatan. Pemantauan dilakukan secara internal dan eksternal untuk mengevaluasi pencapaian program. Selain itu, pengawasan dan penilaian (P3) memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar serta regulasi yang berlaku, sehingga perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di puskesmas.

Output

Dalam evaluasi hasil kinerja yang dicapai sampai saat ini sangat dipengaruhi beberapa strategi organisasi dalam mencapai target mengutamakan aspek pelayanan, penggerakan SDM, keuangan dan

Tabel 1 Output

NO	Jenis Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Pernyataan Standar	Target	Capaian
1	pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai Standar pelayanan Antenatal	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100	100
2	pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai Standar pelayanan bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100
3	pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
4	pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
5	pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar pelayanan usia pendidikan dasar	Setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100
6	pelayanan kesehatan usia lanjut	Sesuai standar kesehatan usia lanjut	Setiap masyarakat usia 65 ke atas mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100

promosi. Kebijakan yang diambil dalam pencapaian hasil kinerja adalah mengembangkan partisipasi aktif dari semua komponen Puskesmas dalam pelayanan, dan pembagian tugas sesuai dengan profesi, kompetensi, dan keterampilan yang dimiliki.

Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses manajemen, karena melalui evaluasi dapat diperoleh umpan balik (*feedback*) terhadap program atau pelaksanaan kegiatan. Tanpa evaluasi, sulit untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang direncanakan telah mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Kepala Puskesmas Tomia menegaskan bahwa setiap kegiatan yang selesai dilaksanakan selalu dievaluasi melalui rapat untuk menilai pencapaian sasaran atau target. Sekretaris Puskesmas Tomia juga menyatakan bahwa evaluasi dilakukan secara rutin melalui rapat bulanan dan tahunan untuk meninjau kinerja setiap anggota puskesmas. Hal serupa disampaikan oleh perawat Puskesmas Tomia yang menilai bahwa evaluasi sangat membantu dalam memastikan kegiatan berjalan sesuai target. Staf Puskesmas Tomia menambahkan bahwa evaluasi yang dilakukan secara berkala bertujuan untuk mempertahankan pencapaian yang telah diraih. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa evaluasi di Puskesmas Tomia dilakukan secara rutin melalui rapat bulanan dan tahunan

untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan.

Permasalahan/ hambatan

Dalam setiap pelayanan, hambatan merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari, terutama dalam pelayanan kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak di Puskesmas Tomia, Kabupaten Wakatobi, ditemukan beberapa kendala utama yang menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan. Kepala Puskesmas mengungkapkan bahwa kurangnya jumlah petugas, minimnya kerja sama antar rekan kerja, serta keterbatasan pemahaman terkait SOP menjadi faktor penghambat utama. Sekretaris Puskesmas menambahkan bahwa komunikasi dan pendekatan petugas yang kurang optimal serta keterbatasan peralatan turut menjadi masalah. Hal serupa disampaikan oleh perawat yang menyoroti kurangnya sumber daya manusia, adanya rangkap jabatan, serta ketidakcukupan fasilitas kesehatan. Sementara itu, staf puskesmas menegaskan bahwa selain keterbatasan peralatan dan tenaga medis, masih terdapat petugas yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam standar pelayanan kesehatan di Puskesmas Tomia meliputi keterbatasan tenaga medis, kurangnya kerja sama dan komunikasi antar petugas, rendahnya pemahaman terhadap SOP, serta belum memadainya peralatan dan fasilitas pendukung.

Solusi

Setiap kegiatan tentu akan menghadapi berbagai hambatan, termasuk dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efektif untuk mengatasi kendala tersebut agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Di Puskesmas Tomia, Kabupaten Wakatobi, beberapa solusi telah diusulkan untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan minimal. Kepala Puskesmas Tomia menyarankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan bagi petugas untuk melanjutkan pendidikan, serta mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop. Selain itu, upaya penambahan fasilitas kesehatan juga menjadi prioritas dengan mengajukan permohonan anggaran kepada pemerintah daerah melalui dinas kesehatan, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Puskesmas Tomia menekankan bahwa salah satu solusi mendesak yang perlu segera dilakukan adalah penambahan tenaga kesehatan, yang telah diusulkan kepada pemerintah kabupaten melalui dinas kesehatan Kabupaten Wakatobi.

Kendala-kendala yang dihadapi Puskesmas Kecamatan Tomia terkait Evaluasi Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan

Evaluasi terhadap sumber daya manusia (SDM) di UPTD Puskesmas Tomia sangat penting dilakukan, mengingat SDM merupakan

faktor kunci dalam keberhasilan program kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Ketersediaan tenaga medis yang profesional, seperti dokter dan paramedis, berperan besar dalam mengatasi kendala yang sering muncul, seperti rendahnya capaian program kesehatan, misalnya cakupan kunjungan ibu hamil, pelayanan nifas, dan pemberian makanan pendamping ASI. Selain itu, masih terdapat kekurangan tenaga medis di beberapa posisi strategis, seperti asisten apoteker, pengemudi mobil puskesmas keliling, dan sopir ambulans. Kurangnya tenaga medis ini berdampak pada keterbatasan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas layanan, diperlukan penambahan tenaga medis serta peningkatan edukasi kesehatan bagi masyarakat melalui unit-unit puskesmas pembantu di berbagai wilayah. Dengan demikian, program pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara lebih menyeluruh dan optimal. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan Kepala Puskesmas, Sekretaris Puskesmas, perawat, serta staf UPTD Puskesmas Tomia, dapat disimpulkan bahwa kekurangan tenaga medis menjadi faktor penghambat utama dalam upaya pelaksanaan SPM di puskesmas tersebut.

Selain SDM, sarana dan prasarana juga merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Tomia. Sarana kesehatan mencakup berbagai peralatan medis yang digunakan tenaga kesehatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sedangkan prasarana kesehatan mencakup fasilitas

pendukung yang memudahkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara efektif. Ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar sangat berpengaruh terhadap pencapaian SPM. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam hal ini, seperti kurangnya peralatan medis, obat-obatan, serta kelengkapan di ruang kerja dan laboratorium. Hal ini menghambat tenaga kesehatan dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak di UPTD Puskesmas Tomia, ditemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi standar pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut. Sesuai dengan pernyataan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat (2007), peralatan kesehatan merupakan salah satu sumber daya penting yang menentukan mutu dan kesinambungan layanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik Kesimpulan Evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di UPT Puskesmas Tomia mencakup aspek struktur, target, sumber daya manusia, dana, dan fasilitas. Secara umum, pelayanan telah berjalan sesuai standar, meskipun masih terdapat

beberapa kendala, terutama dalam hal kekurangan tenaga kesehatan. Dari segi pengorganisasian, tugas petugas kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian kerja, mencakup tahap perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap tahapan ini dilakukan guna memastikan bahwa target pelayanan dapat dicapai secara optimal. Evaluasi hasil pelayanan menunjukkan adanya peningkatan capaian setiap tahunnya, sebagaimana tercermin dalam laporan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Puskesmas Tomia menyediakan berbagai layanan kesehatan, seperti pelayanan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, serta lansia. Evaluasi rutin dilakukan melalui rapat bulanan dan tahunan guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi, seperti kurangnya tenaga medis, keterbatasan pemahaman petugas terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta minimnya sarana dan prasarana, termasuk laboratorium dan ketersediaan obat-obatan. Solusi utama yang diperlukan adalah penambahan tenaga kesehatan dan peningkatan fasilitas guna mendukung pelayanan yang lebih baik. Dengan adanya langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Puskesmas Tomia dapat semakin meningkat dan memenuhi target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkin, M. C. (2004). *Evaluation roots: Tracing theorists' views and influences*. Sage Publications.
- Donabedian, A. (1980). *The definition of quality and approaches to its assessment*. Health Administration Press.
- Hardiyansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Gava Media.
- Kepmenkes RI. (2000). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 951/Menkes/SK/ VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lababa, D. (2008). *Evaluasi program: Sebuah pengantar*. Surya Dharma.
- Levey, S., & Loomba, N. P. (1973). *Health care administration: A managerial perspective*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Muninjaya, A. A. G. (2011). *Manajemen mutu pelayanan kesehatan*. EGC.
- Pasolong, H. (2012). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Permenkes. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Subarsono, A. G. (2008). *Analisis kebijakan publik*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang. (1992). *UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*. Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang. (2009). *UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang. (2018). *UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Pemerintah Pusat.
- Widoyoko, S. E. P. (2013). *Evaluasi program pembelajaran: Panduan praktis bagi pendidik dan calon pendidik*. Pustaka Pelajar.